

POLICY OF INDRAGIRI HILIR REGENCY LOCAL GOVERNMENT IN SOLOP ECOTOURISM DEVELOPMENT IN 2018

Oleh : M. Hadi

Pembimbing : Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Solop Ecotourism Area is one of the leadest tours in Indragiri Hilir Regency, which is a tourism concept that utilizes local resources by connecting amongst natural tourism trips that have vision and mission of conservation and environment love. The other, the concept of ecotourism is also directed to maintaining local culture. Solop ecotourism is jointly managed by Indragiri Hilir Regency Local Government with Pulau Cawan Village. The budgeted funds for Solop Ecotourism that are still very minimal, which is causing the development of the area and the procurement of facilities and infrastructure that must be going through a priority scale. This study aims to determine the policy of Indragiri Hilir Regency Local Government in developing Solop Ecotourism in 2018. The type used in this study is descriptive research with a qualitative research approach. The types of research data are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study are interview and documentation. Technical data analysis used is qualitative descriptive data analysis. Based on the results of the study, policies carried out by Indragiri Hilir Regency Local Government in developing Solop Ecotourism are as follows; 1) Promoted and reintroduced by rebranding Solop Beach tours into Ecotourism Solop; 2) Synergize with the Cawan Island Village Government; 3) Encourage the development of facilities and infrastructure to support the development of Solop Ecotourism; 4) Issue Decrees that related to Solop Ecotourism (Destination Decree and Tourist Attraction Decree); 5) Conduct socialization and training on tourism and empowerment of communities around the Solop Ecotourism area; 6) Hold events in the Solop Ecotourism area. There are factors that influence the policy of Indragiri Hilir Regency Local Government in developing Ecotourism in Solop that:: 1) Internal factors: Local government policy in the form of Local Regulation regarding Solop Ecotourism development doesn't exist, Lack of human resources, lack of budget, and lack of facilities (facility and infrastructure). 2) External factors: Far from location, and accessibility that is difficult to reach to the Solop Ecotourism area.

Keywords: Local Government, Policy, Ecotourism

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah untuk dikembangkan. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengelola potensi-potensi yang ada di daerahnya untuk dimanfaatkan secara efektif dan efisien agar terselenggaranya aktivitas pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daerahnya. Dengan demikian pemerintah daerah berkewajiban melakukan usaha-usaha untuk pengembangan potensi yang ada di daerahnya. Salah satunya adalah sektor pariwisata, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1
Destinasi Pariwisata Dan Objek Daya Tarik Wisata Di Kabupaten Indragiri Hilir

No	Destinasi Pariwisata	Daya Tarik Wisata	Lokasi
1	Ekowisata Solop	1. Pantai Solop 2. Hutan Mangrove 3. Tracking Mangrove 4. Festival Pantai Solop 5. Habitat Lumba-lumba/Pesut 6. Habitat Bangau Putih Susu 7. Wisata Memancing 8. Kuliner Khas	Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah
2	Makam Tuan Guru Syekh H. Abdurrahman Siddik	1. Ziarah Makam 2. Even Haul Tuan Guru Syekh H. Abdurrahman Siddik	Desa Teluk Dalam Kecamatan Kuindra
3	-	Even Wisata Gema Muharrah	Tembilahan
4	-	Even Wisata Sampan Leper	Tembilahan Kel. Getek
5	-	Even Wisata Manongkah	Kecamatan Tanah Merah, Concong
6	-	Air Terjun 86	Kecamatan Kemuning
7	-	Air Terjun	Kecamatan

		Tembulon Ruso	Kemuning
8	-	Wisata Adventure Pulau Basu	Desa Pulau Basu
9	-	Festival Sungai Indragiri	Kempas Jaya Kel. Tembilahan Hulu
10	-	Hutan Mangrove Sei. Asam	Kecamatan Reteh
11	-	Pantai Lumpur / Mudflat	Kecamatan Mandah, Concong, Kuindra
12	-	Even Lomba Sampan Slodang	Kecamatan Gaung

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir 2017

Obyek wisata Indragiri Hilir juga tidak terlepas dari kebudayaan, kesenian bahasa dan sastra sebagai daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga dalam usaha pengembangannya memerlukan kerjasama pada setiap elemen, khususnya Pemerintah Daerah dan SKPD yang ada di Indragiri Hilir demi tercapainya tujuan kepariwisataan tersebut. Salah satu usaha yang telah dilakukan adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah Indragiri Hilir dengan Pemerintah Desa Pulau Cawan yaitu dengan membuat Kelompok Sadar Wisata.

Salah satu upaya pemanfaatan sumber daya lokal yang optimal adalah dengan mengembangkan pariwisata dengan konsep ekowisata. Dalam konteks ini wisata yang dilakukan memiliki bagian yang tidak terpisahkan dengan upaya-upaya konservasi, pemberdayaan ekonomi lokal dan mendorong respek yang lebih tinggi terhadap perbedaan kultur atau budaya. Hal inilah yang mendasari perbedaan antara konsep ekowisata dengan model wisata konvensional yang telah ada sebelumnya.

Kawasan Ekowisata Solop adalah salah satu objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Ekowisata Solop memiliki pantai putih sepanjang 2 kilometer. Pantai ini memiliki keunikan tersendiri dibanding pantai-pantai lain,

yaitu pasir putih yang merupakan pasir dari fosil hewan laut, seperti karang-karang dan biota laut sejenisnya, sehingga dikenal dengan nama Pasir Seresah. Tepat dibelakang pantai terdapat hutan mangrove alami seluas 40 Km² yang terdiri dari berbagai jenis Mangrove antara lain Kedabu, Tumu, Perepat, Nyirih Batu dan masih banyak lagi. Selain itu, Ekowisata Solop juga kaya akan flora dan fauna langka, mulai dari Elang Bondol, Bangau Tongtong, berbagai jenis monyet dan lain sebagainya. Hutan ini dapat disusuri dengan dua jalur yakni tracking kering dan tracking basah. Tracking kering dengan jalur jerambah yang dibangun membentang sepanjang 1500 meter yang berada persis dibawah rimbunnya pohon-pohon Bakau alami dengan akarnya yang saling mencapai setinggi 2 meter. Tracking basah sendiri merupakan sungai kecil bernama Sungai Kenceng yang membentang persis di tengah hutan dengan menggunakan sampan kecil milik masyarakat.

Objek daya tarik wisata yang menarik di Kawasan Ekowisata Solop diantaranya Pantai Solop dengan pasir seresahnya, Hutan Mangrove yang masih alami, *Tracking Mangrove*, Festival Pantai Solop, Habitat Lumba-lumba/Pesut, Habitat Bangau Putih Susu, Wisata Memancing khususnya Pari, dan Kuliner khas daerah setempat. Namun, fasilitas yang ada di kawasan Ekowisata Solop tidak terawat dengan baik, beberapa fasilitas bahkan telah rusak dan tidak sejalan dengan peningkatan jumlah pengunjung Ekowisata Solop.

Tabel 2
Jumlah Dan Persentase Pengunjung Ekowisata Solop Kabupaten Indragiri Hilir dari Tahun 2013-2017

Nama Destinasi Wisata	Lokasi	Jenis Objek Wisata	Luas	Tahun				
				2013	2014	2015	2016	2017
Ekowisata Solop	Kecamatan Mandal	Wisata Bahari	40 Km ²	100 /-	1332 /33,2%	1241/- 6,83%	1542 /24,2 %	1552/0,6 4%

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, dan

Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir 2018

Tabel 3
Jumlah Pengunjung yang Memanfaatkan Fasilitas (Homestay) Ekowisata Solop

Homestay Ekowisata Solop	Tahun		
	2016	2017	2018
	16	25	33

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir 2018

Dari tabel jumlah dan persentase pengunjung ekowisata solop kabupaten indragiri hilir dari tahun 2013-2017 tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 hingga tahun 2017 jumlah pengunjung Ekowisata Solop mengalami peningkatan, dan dari table jumlah pengunjung yang memanfaatkan fasilitas (homestay) Ekowisata Solop dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 sampai tahun 2018 jumlah pengunjung yang bermalam di *homestay* juga mengalami peningkatan, hal ini juga tidak lepas dari beberapa usaha pengembangan yang berangsur-angsur dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan beberapa SKPD, mulai dari pembangunan *Tracking Mangrove* Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Dinas Perikanan, pembangunan pelabuhan dermaga yang ada di kawasan Ekowisata Solop bekerjasama dengan Dinas Perhubungan, sedangkan Pemerintah Daerah sendiri telah membangun wc umum, beberapa gazebo, termasuk beberapa tower air. Pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah Indragiri Hilir dalam usaha pengembangan Ekowisata Solop ini harus melalui skala prioritas karena dana yang dianggarkan untuk Ekowisata Solop masih terbilang minim.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis

merumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengembangan Ekowisata Solop tahun 2018?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengembangan Ekowisata Solop tahun 2018?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengembangan Ekowisata Solop tahun 2018.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengembangan Ekowisata Solop tahun 2018.

KERANGKA TEORI

Ekowisata

Wearing dan Neil mengatakan bahwa ide ekowisata yang berkaitan dengan kegiatan wisata diharapkan dapat mendukung konservasi lingkungan hidup, karena tujuan dari ekowisata adalah menciptakan sebuah kegiatan industri wisata yang mampu memberikan peran alam konservasi lingkungan hidup dan berdampak rendah terhadap lingkungan. Sehingga ekowisata memiliki karakteristik tertentu yaitu (1) adanya manajemen lokal dalam pengelolaan (2) adanya produk perjalanan yang berkualitas (3) adanya penghargaan terhadap budaya setempat (4) pentingnya pelatihan-

pelatihan (5) berhubungan dengan sumber daya alam dan budaya.¹

Kebijakan

Model implementasi kebijakan ketiga yang berperspektif *top-down* dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *direct and indirect impact on implementation*. Dalam pendekatan yang diterapkan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan sebagai berikut:²

1. Komunikasi
2. Struktur birokrasi
3. Sumber daya
4. Disposisi

Kebijakan Ekowisata

Kebijakan pengembangan ekowisata merupakan implementasi sistem manajemen nasional yang melekat kepada sistem kelembagaan yang sedang berlaku. Kebijakan ekowisata dapat mengacu kepada hubungan antar industri maupun terlaksananya fungsi-fungsi organisasi. Hubungan antar industri ditunjukkan dengan keterkaitan sektor jasa ekowisata dengan sektor lainnya, misalnya kehutanan, perkotaan, pendidikan, dan infrastruktur. Sementara hubungan fungsional organisasi mengacu pada fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Lebih jauh, dalam banyak hal kebijakan ekowisata juga mengacu pada perkembangan lingkungan global.

Peran Pemerintah Daerah sangat penting untuk mengoprasionalkan

¹ Luchman Hakim, *Dasar-dasar Ekowisata*. Banyumedia. Malang: 2004. Hlm.53

² Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2008. Hlm.136

pengembangan ekowisata dilandasi prinsip-prinsip sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, dalam pasal 2 yaitu :

1. Kesesuaian anantara jenis dan karakteristik ekowisata.
2. Konservasi, yaitu melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan secara lestari sumber daya alam yang digunakan untuk ekowisata.
3. Ekonomis, yaitu memberikan manfaat untuk masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan.
4. Edukasi, yaitu mengandung unsur pendidikan untuk mengubah persepsi seseorang agar memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.
5. Memberikan kepuasan dan pengalaman kepada pengunjung.
6. Partisipasi masyarakat, yaitu peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan, dan
7. Menampung kearifan lokal.³

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif adalah masalah yang berkenaan dengan variabel

mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan dan menghubungkan.⁴

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah kualitatif, berasal dari data yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumen pribadi, catatan/memo, dan dokumen resmi lainnya. Dalam konteks ini pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dihasilkan dari data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.⁵

PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Pengembangan Ekowisata Solop

Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan beberapa upaya untuk pengembangan Ekowisata Solop, yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan promosi dan pengenalan kembali dengan cara *rebranding* wisata Pantai Solop menjadi Ekowisata Solop.
- b. Melakukan sinergitas dengan Pemerintah Desa Pulau Cawan.
- c. Mendorong pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang pengembangan Ekowisata Solop.
- d. Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait dengan Ekowisata Solop (SK Destinasi dan SK Objek Daya Tarik Wisata).
- e. Melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan Ekowisata Solop.

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah

⁴ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. Hlm.41

⁵ Suyanto Bagong. *Metode Penelitian Sosial*. Kencana. Jakarta: 2010, Hlm.5

- f. Mengadakan *event-event* di kawasan Ekowisata Solop.

1. Komunikasi

Terdapat 3 (tiga) indikator yang berkaitan dengan baiknya komunikasi antara Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kelompok Sadar Wisata selaku pengelola Ekowisata Solop yang dapat mengukur keberhasilan komunikasi sebagai berikut :

a. Transformasi Informasi (Transmisi)

Transmisi adalah penyaluran komunikasi yang baik kepada masyarakat dan memperhatikan pembuatan saluran yang dipakai untuk mengirim informasi serta memastikan informasi tersebut sampai secara akurat. Terlaksananya suatu Penerapan Kebijakan maka diperlukan komunikasi dari pihak yang akan menerapkan peraturan kemudian dari pihak yang akan diterapkan peraturan. Sebagaimana disampaikan Ibu Esti Naruliza, S.Sos, M.Si selaku Kepala Seksi Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir, mengatakan:

“Komunikasi kami dengan pihak pengelola Ekowisata Solop seperti Pemerintah Desa, kelompok sadar wisata dan masyarakat setempat sangat baik walaupun dengan jarak yang bisa dibilang cukup jauh. Kita sering melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat melalui Ekowisata Solop ini, baik yang dilakukan untuk Kelompok Sadar Wisata maupun masyarakat setempat yang memang terlibat langsung sebagai pelaku wisata yang

tinggal disekitar kawasan Ekowisata Solop. Kita juga sering melakukan kunjungan dan kegiatan melalui event-event dan mengikutsertakan berbagai komunitas seperti komunitas seni teater, seni tari, seni musik, komunitas pencinta alam, komunitas sepeda, komunitas fotografi dan masih banyak lagi komunitas lain” (Rabu, 24 oktober 2018).

Dari hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa komunikasi antara pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir dengan pihak Desa dan Kelompok Sadar Wisata selaku pengelola Ekowisata Solop berjalan sangat baik sehingga tidak terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi atau adanya salah pengertian (miskomunikasi).

b. Kejelasan (Clarity)

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu).⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hatta selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata Magrove Lestari Desa Pulau Cawan mengatakan :

“Kejelasan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir kepada kami yang juga terlibat sebagai pelaksana program pengembangan Ekowisata Solop sangat jelas, contohnya seperti saat diselenggarakannya event-event di Solop kami terlebih dahulu dikumpulkan, kita adakan rapat,

⁶Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebiajahn Publik*, Bandung: Alfabeta, 2008. Hlm.137

sampai pembagian panitia semuanya memang harus jelas”(Minggu, 28 oktober 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan mengenai kebijakan Pemerintah Daerah Indragiri Hilir dalam pengembangan Ekowisata Solop sudah sangat jelas, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahpahaman yang bisa membuat penerapan kebijakan tersebut keluar dari jalur yang sudah direncanakan saat program kebijakan dilaksanakan.

c. Konsistensi (Consistency)

Konsistensi berupa perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Erni Yusnita, SE, MH selaku Kepala Bidang Pariwisata di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan :

“Tentu kami sangat konsisten dalam mengkomunikasikan perintah yang akan dijalankan, karena kalau komunikasi yang kami sampaikan sering berubah-ubah maka akan berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan dalam kebijakan yang sudah dibuat”(Senin, 29 oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pariwisata Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir, bahwa konsistensi berupa perintah dalam pelaksanaan suatu komunikasi

mengenai program-program yang berkaitan dengan pengembangan Ekowisata Solop sudah sangat konsisten, sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

2. Struktur Birokrasi

Ada beberapa unit terkait dalam pengembangan Ekowisata Solop, yaitu Bidang Pariwisata dan Bidang Sarana dan Prasarana di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir yang melakukan kerja sama dalam pembangunan fasilitas untuk Ekowisata Solop dengan beberapa SKPD yaitu Dinas Perikanan dan Dinas Perhubungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Erni Yusnita, SE, MH selaku Kepala Bidang Pariwisata di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan :

“Koordinasi dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bisa diajak bekerja sama untuk bisa membantu melaksanakan kebijakan pengembangan Ekowisata Solop ini memang kami lakukan dan masih tetap berada di jalur atau acuan kami yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 tahun 2006 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 06 tahun 2009 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA)”(Senin, 29 oktober 2018).

Koordinasi yang dilakukan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini ditangani oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun pihak-pihak lain yang bisa diajak bekerja sama untuk membantu melaksanakan kebijakan pengembangan Ekowisata

Solop ini sudah terkoordinasi dengan baik dan tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kepariwisata dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 06 tahun 2009 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPPDA).

3. Sumber Daya

a. Staf

Sumber daya utama dalam penerapan suatu kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Sedangkan kualitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia implementasi akan berjalan lambat.

Tabel 4
Sumber Daya Manusia Dinas
Pariwisata, Kepemudaan dan
Olahraga dan Kebudayaan
Kabupaten Indragiri Hilir di Bidang
Pariwisata

No.	Nama	Jabatan
1	Hj. Erni Yusnita, SE, MH	Kabid Pariwisata
2	Hj. Asmanidar, Sp	Kasi Fasilitas Kelembagaan Masyarakat Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
3	Aldi Kusnandar, SE	Kasi Bina Usaha Pariwisata
4	Esti Naruliza, S.Sos, M.Si	Kasi Pengembangan Destinasi Dan Pemasaran Pariwisata
5	R. Girindra, S.I.Kom	Staf
6	Rahmat Hidayat	Staf
7	Maina	Honoror
8	Marjuanda	Honoror
9	Dwi Kuntara	Honoror
10	Dedi Kurniawan	Honoror

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Erni Yusnita, SE, MH

selaku Kepala Bidang Pariwisata di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan :

“Jumlah Staf khususnya di Bidang Pariwisata sebenarnya belum mencukup, apalagi untuk anggota yang akan turun ke lapangan. Sedangkan untuk dilapangan sebenarnya kita harus banyak anggota yang bekerja dan kita harapkan tenaganya untuk program-program yang dibuat untuk Kepariwisata” (Senin, 29 oktober 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa sumber daya manusia atau staf pada bidang pariwisata di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir memang masih terbilang kurang, sehingga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu program kebijakan pengembangan Ekowisata Solop.

b. Wewenang

Pada umumnya wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata pada pasal 30 terdapat wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota :

- Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten/Kota;
- Menetapkan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota;
- Menetapkan daya tarik wisata Kabupaten/Kota;
- Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan

- produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
 - Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup Kabupaten/Kota;
 - Memlihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
 - Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
 - Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

c. Anggaran

Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau infestasi atas program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai kebijakan tidak berjalan efektif.

Tabel 5

Alokasi Anggaran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2018

No.	Keterangan	Jumlah Anggaran	Tahun
1	Program Ekowisata Solop	Rp. 900.000.000	2017
2	Program Ekowisata Solop	Rp. 177.000.000	2018

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Esti Naruliza, S.Sos, M.Si selaku Kepala Seksi Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan:

“Anggaran untuk Ekowisata Solop ini sangat terbatas sekali, dan

dananya berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), apalagi sekarang semenjak ada rasionalisasi pemotongan 20%, sehingga dana yang ada masih sangat kurang untuk mendukung pengembangan Ekowisata Solop” (Rabu, 24 oktober 2018).

Dana yang dianggarkan untuk program Ekowisata Solop ini berasal dari APBD Provinsi Riau dan APBD Kabupaten Indragiri Hilir. Anggaran dana yang ada untuk program Ekowisata Solop ini sangat terbatas dan masih kurang untuk menunjang pengembangan Ekowisata Solop.

d. Fasilitas

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Afandi, SKM, M.M, M.H selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan:

“Kami sedang melakukan beberapa pembangunan untuk menambah fasilitas yang ada di Kawasan Ekowisata Solop ini, namun untuk fasilitas yang mengalami kerusakan belum bisa kami lakukan perbaikan karena minimnya dana yang ada” (Senin, 29 oktober 2018).

Tabel 6

Fasilitas (Sarana dan Prasarana) di Kawasan Ekowisata Solop

No	Fasilitas	Jumlah	0Kondisi
1	Pelabuhan	1	Baik
2	Homestay	1	Baik
3	Toilet	4	Cukup Baik
4	Ruang Ganti	1	Baik

5	Gazebo	4	Kurang Baik
6	Gapura	1	Baik
7	Jalan Setapak	60 meter persegi	Baik
8	Sumur Bor	1	Baik
9	Tower Air	2	Baik
10	Panggung Wisata	1	Baik
11	Tracking Mangrove	1500 meter	Cukup Baik

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018

Dari hasil wawancara dan tabel diatas diketahui bahwa fasilitas yang tersedia dilokasi Kawasan Ekowisata Solop belum memadai, hal ini dikarenakan minimnya anggaran untuk memelihara, merawat dan melindungi sarana dan prasarana yang ada di Kawasan Ekowisata Solop.

4. Disposisi

Menurut George Edward III disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan. Kecendrungan perilaku dari pelaksana kebijakan berperan penting dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Junaidy, S.Sos, M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan :

“Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 tahun 2006 tentang Kepariwisata dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 06 tahun 2009 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) yang menjadi acuan kami dari Pemerintah daerah yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab kami di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan kebijakan atau program-program pengembangan Ekowisata Solop,

namun hambatan-hambatan yang ada dalam proses pengembangan Ekowisata Solop ini tidak bisa kami hindari walaupun begitu kami tetap berusaha melakukan yang terbaik agar yang menjadi tujuan kita bisa tercapai”(Rabu, 24 oktober 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pemerintah Daerah Bapak Junaidy, S.Sos, M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir dapat disimpulkan bahwa yang menjadi acuan dari pihak Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakannya untuk pengembangan Ekowisata Solop mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 tahun 2006 tentang Kepariwisata dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 06 tahun 2009 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA). Namun, ada beberapa program yang kurang berjalan maksimal dikarenakan ada beberapa hambatan yang memang tidak bisa untuk dihindari.

Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Pengembangan Ekowisata Solop

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengembangan Ekowisata Solop sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Dasar Hukum Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Terkait Pengembangan Ekowisata Solop

Kebijakan pemerintah sama dengan kebijaksanaan berbagai bentuk lain, misalnya seperti kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat berupa

Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (KepMen) dan lainnya. Sedangkan jika kebijakan pemerintah tersebut dibuat oleh Pemerintah Daerah akan melahirkan Surat Keputusan (SK), Peraturan Daerah (Perda) dan lainnya.

Belum adanya dasar hukum kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir terkait pengembangan Ekowisata Solop menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan Pemerintah Daerah dalam usaha pengembangan Kawasan Ekowisata Solop. Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sejauh ini masih belum membuat atau mengeluarkan kebijakan berupa Surat Keputusan ataupun Peraturan Daerah yang jelas mengenai pengembangan Ekowisata Solop, melainkan masih mengacu pada Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.295/V/HK-2017 tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Dan Objek Daya Tarik Wisata Di Kabupaten Indragiri Hilir dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA). Berdasarkan wawancara dengan Bapak Herwanisitas selaku Wakil Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, mengatakan :

“Untuk keberhasilan pengembangan Ekowisata Solop ini memang seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah mengenai pengembangan Ekowisata Solop sebagai landasan kebijakan pengembangan Ekowisata Solop itu sendiri, karena sudah tidak relevan jika masih mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) dan

Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.295/V/HK-2017 tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Dan Objek Daya Tarik Wisata Di Kabupaten Indragiri Hilir.” (Senin, 18 februari 2019)..

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam usaha Pemerintah Daerah dalam pengembangan Ekowisata Solop di Kabupaten Indragiri Hilir. Kegagalan yang sering terjadi dalam penerapan kebijakan atau pelaksanaan program-program kegiatan salah satunya disebabkan oleh sumber daya manusia yang terbatas, tidak mencukupi, memadai, atau tidak kompeten dibidangnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Erni Yusnita, SE, MH selaku Kepala Bidang Pariwisata di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan :

“Kurangnya sumber daya manusia atau staf kami di Bidang Pariwisata ini juga berpengaruh dalam usaha pengembangan Ekowisata Solop, dan itu berdampak pada beberapa program yang dilakukan dan kerja sama dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam usaha pengembangan Ekowisata Solop yang menyebabkan kurangnya pengawasan yang seharusnya dilakukan”(Senin, 29 oktober 2018).

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pariwisata di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir dijelaskan bahwa kurangnya sumber daya manusia atau yang disebut staf dan anggota yang terlibat dalam

pengembangan Ekowisata Solop dan pihak pengelola menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam usaha Pengembangan Ekowisata Solop.

c. Anggaran

Dana yang di anggarkan untuk Ekowisata Solop dinilai masih belum cukup untuk melakukan pengembangan kawasan Ekowisata Solop secara maksimal, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Junaidy, S.Sos, M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan :

“Sebenarnya faktor utama yang mempengaruhi pengembangan wisata ini adalah minimnya dana, sehingga pihak kami mengalami kesulitan dalam memaksimalkan usaha pengembangan Ekowisata Solop. Dengan keterbatasan anggaran, menyebabkan pengembangan Ekowisata Solop harus melalui skala prioritas” (Rabu, 24 oktober 2018).

Kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan Ekowisata Solop ini berpengaruh pada usaha Pemerintah Daerah untuk melakukan pengembangan, seperti tidak adanya dana untuk perbaikan fasilitas yang rusak, tidak adanya dana untuk petugas kebersihan, hal itulah yang menyebabkan pengembangan Ekowisata Solop menjadi terkesan lamban.

d. Fasilitas (Sarana dan Prasarana)

Fasilitas (sarana dan prasarana) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi program kebijakan pengembangan Ekowisata Solop. Berdasarkan hasil wawancara dengan

Bapak Ahmad Afandi, SKM, M.M, M.H selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan:

“Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi usaha pengembangan Ekowisata Solop yang kami lakukan, salah satunya adalah masih kurangnya fasilitas yang ada di Kawasan Ekowisata Solop, karena fasilitas (sarana dan prasarana) sangat menunjang pengembangan sebuah destinasi pariwisata untuk membuat pengunjung merasa betah, nyaman dan selalu ingin berkunjung kembali” (Senin, 29 oktober 2018)

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir dapat disimpulkan bahwa fasilitas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi program kebijakan pengembangan Ekowisata. Kurangnya jumlah fasilitas pendukung yang ada di kawasan Ekowisata Solop dan kurang terpeliharanya fasilitas yang ada dikarenakan minimnya dana yang di anggarkan untuk Ekowisata Solop menjadi kendala atau faktor yang sangat mempengaruhi Ekowisata Solop untuk berkembang.

2. Faktor Eksternal

a. Lokasi

Lokasi kawasan Ekowisata Solop yang cukup jauh dari Ibu Kota Kabupaten terlebih lagi Ibu Kota Provinsi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi usaha Pemerintah Daerah dalam melakukan kebijakan pengembangan Ekowisata Solop. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Junaidy, S.Sos, M.Si selaku

Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan :

“Faktor lokasi juga sangat mempengaruhi keberhasilan pengembangan Ekowisata Solop yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, jauhnya lokasi Ekowisata Solop menjadi faktor kurangnya minat wisatawan untuk berkunjung ke kawasan Ekowisata Solop, dan ini adalah faktor yang tidak bisa kita hindari” (Rabu, 24 oktober 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa lokasi yang jauh menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengembangan Ekowisata Solop yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dan jauhnya lokasi ini termasuk faktor yang memang tidak bisa untuk dihindari.

b. Aksesibilitas

Kawasan Ekowisata Solop Ditempuh dari Kota Pekanbaru ke Tembilahan (Ibu Kota Kabupaten Indragiri Hilir) melewati jalur darat menggunakan mobil angkutan umum 6-7 jam, kemudian $\pm$ 90 menit melewati jalur laut menggunakan speedboat dari Tembilahan menuju kawasan Ekowisata Solop, dan sekitar 4-5 jam dari Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau juga melewati jalur laut dengan menggunakan speedboat.

Aksesibilitas untuk menuju kawasan Ekowisata Solop termasuk sulit untuk dijangkau. Selain jauhnya jarak dari Ibu Kota Kabupaten, transportasi yang ada khusus untuk menuju kawasan Ekowisata Solop juga hanya ada dihari libur saja. Ini menjadikan aksesibilitas menuju kawasan Ekowisata Solop menjadi satu diantara beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan Pemerintah

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam usaha pengembangan Ekowisata Solop.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengembangan Ekowisata Solop adalah sebagai berikut :

1. Melakukan promosi dan pengenalan kembali dengan cara *rebranding* wisata Pantai Solop menjadi Ekowisata Solop.
2. Melakukan sinergitas dengan Pemerintah Desa Pulau Cawan.
3. Mendorong pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang pengembangan Ekowisata Solop.
4. Mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait dengan Ekowisata Solop (SK Destinasi dan SK Objek Daya Tarik Wisata).
5. Melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan Ekowisata Solop.
6. Mengadakan *event-event* di kawasan Ekowisata Solop.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan Ekowisata Solop belum maksimal, karena sumber daya yang kurang memadai (staf dan anggaran) untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan Ekowisata Solop.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengembangan Ekowisata Solop, yaitu :

1. Faktor Internal
 - a) Belum adanya kebijakan Pemerintah Daerah berupa Surat Keputusan ataupun Peraturan Daerah yang jelas mengenai pengembangan Ekowisata Solop.
 - b) Kurangnya sumber daya manusia pada Bidang Pariwisata di Dinas

Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir dan pada Kelompok Sadar Wisata Magrove lestari selaku pihak pengelola Ekowisata Solop.

- c) Terbatasnya dana yang dianggarkan untuk Ekowisata Solop menyebabkan usaha pengembangan harus melalui skala prioritas dengan melakukan pembangunan fasilitas secara bertahap.
 - d) Kurangnya fasilitas (sarana dan prasarana) untuk menunjang pengembangan Ekowisata dan kurang terpeliharanya fasilitas yang sudah ada.
2. Faktor Eksternal
- a) Jauhnya lokasi kawasan Ekowisata Solop dari Ibu Kota Kabupaten dan memakan banyak waktu sehingga menyebabkan kurangnya minat wisatawan untuk berkunjung.
 - b) Aksesibilitas yang sulit dijangkau karena tidak bisa menggunakan jalur darat dan hanya menggunakan transportasi air yang hanya ada dihari libur saja.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengembangan Ekowisata Solop maka penelitian akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir harus membuat kebijakan berupa Peraturan Daerah yang membahas kebijakan pengembangan Ekowisata Solop, dan lebih memaksimalkan lagi usaha pengembangan Ekowisata Solop, menambah sumber daya manusia sebagai pelaksana

kebijakan, dan mengusahakan penambahan anggaran untuk Ekowisata Solop agar pengembangan Ekowisata Solop dapat cepat terwujud sesuai dengan apa yang direncanakan.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan menyediakan transportasi khusus menuju ke kawasan Ekowisata Solop agar memudahkan wisatawan yang ingin berkunjung, dan juga harus meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai sehingga membuat kawasan Ekowisata Solop menjadi semakin menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chafid Fandeli, Chafid. 2000. *Pengusahaan Ekowisata*. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
- Damanik, Janianton dan Helmut F. Weber. 2006. *Perencanaan Ekowisata dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta: Pusat Studi Pariwisata (PUSPAR) UGM.
- Hakim, Luchman. 2004. *Dasar-dasar Ekowisata*. Malang: Banyumedia.
- Nasution. 2006. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.

Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. 2002. *Metode Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.

Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Suyanto, Bagong. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.

Winarno, Budi. 2002. "Apakah Kebijakan Publik?" dalam *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo.

Jurnal:

Dias Satria, Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal Dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Kabupaten Malang. Dalam *Journal of Indonesian Applied Economics*. Vol.3 No.1. Mei 2009.

Husnul Khotimah, 2015. Pemerintah dan Masyarakat (Kebijakan Label Pada Barang Di Kota Pekanbaru Tahun 2011-2013). Dalam *Jurnal Jom Fisip* Vol. 2 No. 1. Februari 2015.

Desi Hardianti, Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata Festival Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2017

I Wayan Suardana, Analisis Kebijakan Pengembangan Pariwisata (Intervensi Melalui Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan di Bali).

Elfira Soeda, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.

Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kepariwisata.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA).

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.